

**PEMETAAN *PROBLEM* SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DAN DAMPAKNYA PADA LAPORAN
KEUANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh:

Levena Dewi Anggarini

NIM: 31401900089

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

SKRIPSI

PEMETAAN *PROBLEM* SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN DAMPAKNYA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BOJONEGORO

Disusun oleh:


Levena Dewi Anggarini

Nim: 31401900089

Telah dipertahankan di depan penguji pada tanggal 02 Februari 2023

Susunan Dewan Penguji

Dosen Pembimbing Lapangan



Drs. Osmad Muthaher, M.Si

NIDN: 0711046401

Penguji I

Penguji II



Dr. Chrisna Suhendi, SE, MBA, Akt., CA



Dr. H. M. Jafar Shodiq, SE, S.Si, M.Si.,
Akt., CA, CSRA, CSRS

NIDN: 0603046301

NIDN: 0612026802

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA

NIDN: 0611088001

PERNYATAAN**SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama: Levena Dewi Anggarini

NIM: 31401900089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan Skripsi berjudul “**PEMETAAN PROBLEM SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN DAMPAKNYA PADA LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN BOJONEGORO**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam laporan ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti laporan ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

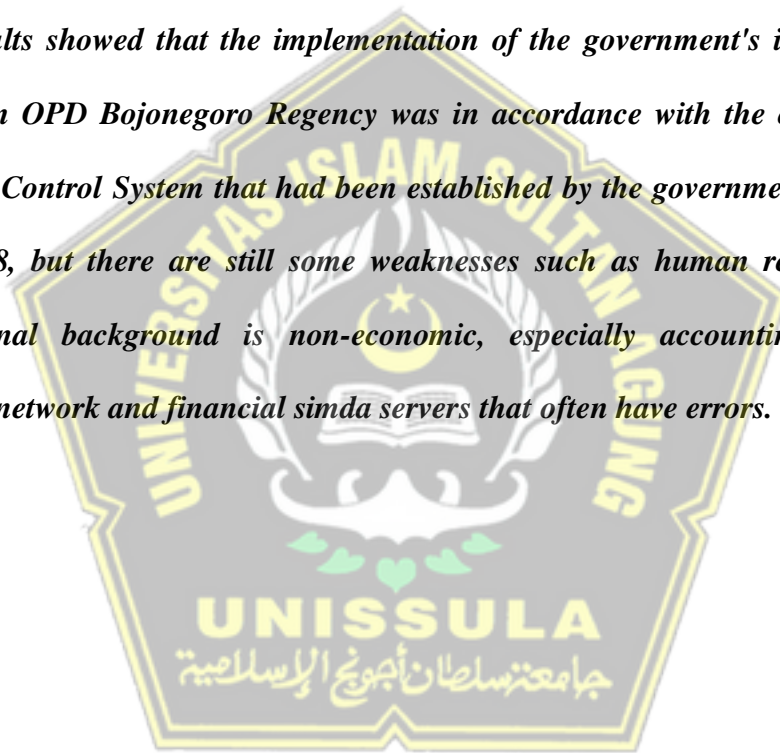
Semarang, 27 Januari 2023

Yang menyatakan

Levena Dewi Anggarini

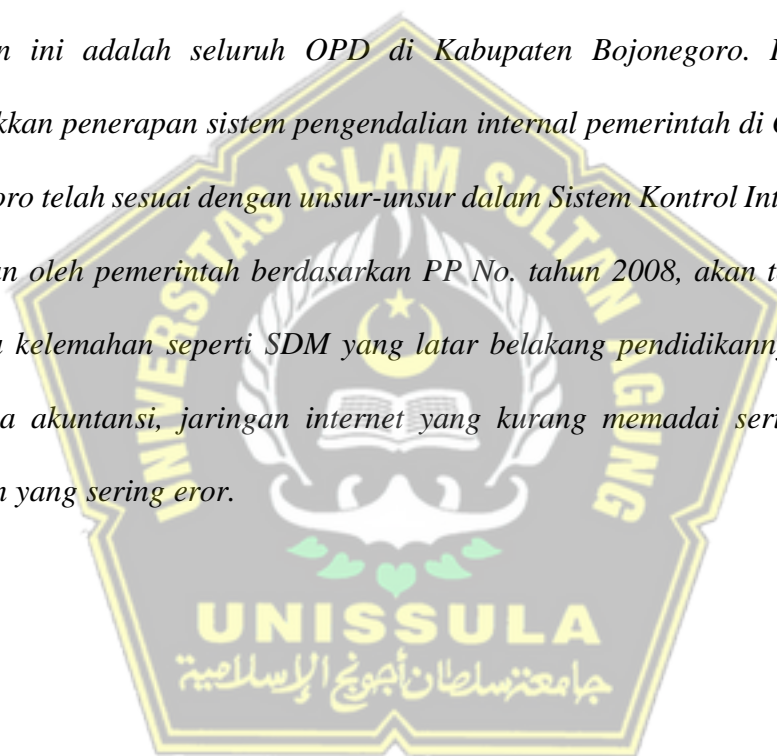
ABSTRACT

This study aims to analyze the suitability of implementing the government's internal control system (SPIP) based on the elements of internal control. The analysis was carried out using descriptive analysis method with the type of research used is qualitative research. The objects in this study were all OPDs in Bojonegoro Regency. The results showed that the implementation of the government's internal control system in OPD Bojonegoro Regency was in accordance with the elements in the Internal Control System that had been established by the government based on PP No. 2008, but there are still some weaknesses such as human resources whose educational background is non-economic, especially accounting, inadequate internet network and financial simda servers that often have errors.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang berdasarkan pada unsur-unsur pengendalian internal. Analisis dilakukan menggunakan metode Analisa deskriptif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Objek pada penelitian ini adalah seluruh OPD di Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di OPD Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan unsur-unsur dalam Sistem Kontrol Internal yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan PP No. tahun 2008, akan tetapi masih ada beberapa kelemahan seperti SDM yang latar belakang pendidikannya non ekonomi khususnya akuntansi, jaringan internet yang kurang memadai serta server simda keuangan yang sering eror.



PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“Pemetaan *Problem* Sistem Pengendalian Internal dan Dampaknya Pada Laporan Keuangan Bojonegoro”**. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang mana telah memberikan kesehatan dan kemudahan dalam proses pembuatan Skripsi
2. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa berdoa dan memberikan semangat untuk kelancaran kuliah saya
3. Prof. Dr. Heru Sulistyono, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA selaku Kepala Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Bapak Drs. Osmad Muthaher, M. Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membantu memberikan saran dan masukan dalam pembuatan Skripsi ini

6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang
7. Bapak Mundhori, S.Sos selaku Dosen Supervisor yang telah memberikan izin magang kepada saya dan membantu untuk kelancaran penulisan Skripsi ini
8. Ibu Anie Susanti Hartoyo, S.E, Ak selaku Kepala Bidang Akuntansi dan seluruh staff Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah memberikan saran dan membantu pengumpulan data untuk penulisan ini
9. Teman-teman yang selalu memberikan dukungan kepada saya.
10. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semarang, 27 Januari 2022

Penyusun

Levena Dewi Anggarini

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	iii
ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
PRAKATA	vi
BAB I	14
PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Tujuan Business Case Report MB-KM	22
1.3 Sistematika Business Case Report Magang MB-KM.....	22
BAB II.....	25
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	25
2.1 Profil Organisasi	25
2.1.1 Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Bojonegoro	25
2.1.2 Data Instansi	25
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	26
2.1.4 Visi dan Misi BPKAD Bojonegoro.....	26

2.1.4 Struktur Organisasi.....	27
2.2 Aktivitas Magang	30
BAB III.....	34
IDENTIFIKASI MASALAH	34
3.1 Identifikasi Masalah	34
BAB IV	38
KAJIAN PUSTAKA.....	38
4.1 Teori Stewardship.....	38
4.2 Kualitas Laporan Keuangan.....	39
4.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia	41
4.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	43
4.5 Sistem Pengendalian Internal.....	45
4.6 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	47
BAB V.....	49
METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	49
5.1 Jenis Penelitian.....	49
5.2 Jenis dan Sumber Data.....	49
5.3 Metode Pengumpulan Data.....	50

5.4 Analisis Data	51
BAB VI	53
ANALISIS DAN PEMBAHASAN	53
6.1 Analisis data dan Pembahasan	53
6.1.1 Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Bojonegoro	53
6.1.2 Dampak Pengendalian Internal pada OPD Kabupaten Bojonegoro	56
BAB VII	61
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	61
7.1 Kesimpulan	61
7.2 Rekomendasi	61
7.2.1 Rekomendasi Hasil Analisis Bab 6	61
7.2.2 Rekomendasi Organisasi Tempat Magang	64
7.2.3 Rekomendasi Program Studi	64
BAB VIII	66
REFLEKSI DIRI	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Opini BPK Kabupaten Bojonegoro.....14

Tabel 1.2 Gambaran Latar Belakang PPK di seluruh OPD Bojonegoro 17



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bojonegoro 29



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Identitas Peserta Magang

LAMPIRAN 2 Daftar Hadir Peserta Magang

LAMPIRAN 3 Catatan Harian (Logbook) Peserta Magang

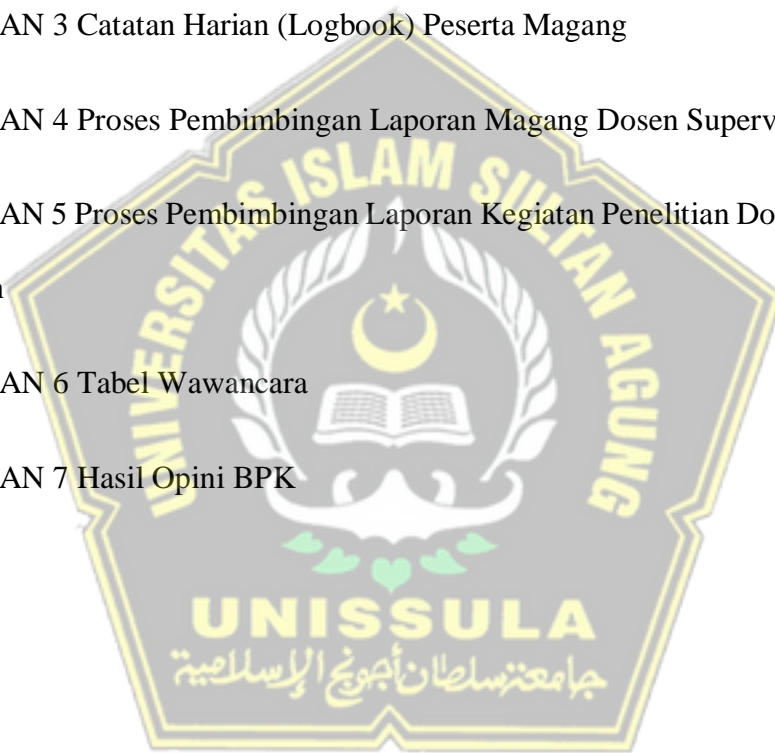
LAMPIRAN 4 Proses Pembimbingan Laporan Magang Dosen Supervisor

LAMPIRAN 5 Proses Pembimbingan Laporan Kegiatan Penelitian Dosen bombinging

Lapangan

LAMPIRAN 6 Tabel Wawancara

LAMPIRAN 7 Hasil Opini BPK



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bersama dengan pengembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, telah menyebabkan kebutuhan untuk akuntabilitas sebagai realisasi tanggung jawab terhadap publik atas kinerja pemerintah dengan memberikan informasi tentang kegiatan dan kinerja pemerintahan kepada masyarakat umum. Sebagai implementasi dari tanggung jawab ini, upaya dapat dilakukan dengan menyediakan akuntabilitas dalam bentuk laporan keuangan. Hal ini diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Membentuk tanggung jawab yang jelas untuk dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, yaitu dengan menyediakan laporan akuntansi dalam bentuk laporan keuangan.

Demikian pula, dengan laporan keuangan yang dibuat di seluruh OPD Kabupaten Bojonegoro, di mana pada tahun 2018-2021 laporan keuangan disajikan secara wajar dalam segala hal, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada akhir periode akuntansi, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, LO, laporan arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Berikut adalah tabel hasil dari

opini Badan Pengawas Keuangan tentang laporan keuangan Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1.1 Hasil Opini BPK Kabupaten Bojonegoro

Indikator Kinerja	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021			Target Akhir 2021	Capaian selama 5 tahun terakhir	
					Target	Realisasi	Capaian			
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%

(Sumber: <https://bpkad.bojonegorokab.go.id/>)

Penggunaan laporan keuangan berasal dari pihak yang berbeda dengan kepentingan yang berbeda. Pengguna laporan keuangan pemerintah meliputi: publik, perwakilan rakyat, lembaga pengawas, badan audit, pihak yang memberikan atau memiliki peran dalam proses donasi, investasi dan pinjaman, serta pemerintah. Penggunaan atau kegunaan dapat ditentukan secara kualitatif. Menurut PP No. 71 Tahun 2010, kualitatif laporan keuangan adalah tindakan normatif yang perlu diimplementasikan dalam informasi akuntansi untuk memenuhi tujuannya. Karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif meliputi: (1) relevan, (2) dapat diandalkan, (3) sebanding, (4) dapat dipahami.

Untuk memenuhi karakteristik kualitatif ini, manajemen keuangan di pemerintah daerah tidak lepas dari peran karyawan yang mengelola dan melakukan pelaporan keuangan. Berkaitan dengan itu kompetensi SDM akan memiliki peran dalam menghasilkan kualitas laporan keuangan. Berikut adalah gambaran latar belakang sumber daya manusia di seluruh wilayah OPD Bojonegoro di pejabat penatausahaan keuangan (PPK).

No.	Uraian	Frekuensi	Persentase
1	Jenis Kelamin		
	Pria	39	62,9%
	Wanita	23	37,1%
2	Usia		
	20-30 tahun	-	-
	31-40 tahun	15	24,2%
	41-50 tahun	34	54,8%
	>50 tahun	13	21%
3	Pendidikan Terakhir		
	SMA/SMK	18	29%
	S1	39	62,9%
	S2	5	8,1%
4	Latar Belakang Pendidikan		
	Ekonomi	11	17,7%
	Akuntansi	6	9,7%
	Manajemen	14	22,6%
	Hukum	6	9,7%
	IPA	3	4,8%
	Lain-Lain	22	35,5%
5	Sertifikat diklat yg dimiliki		

	Tidak ada	19	30,6%
	1	22	35,5%
	2	11	17,7%
	>3	10	16,1%
6	Masa Kerja di instansi saat ini		
	1-5 tahun	14	22,6%
	6-10 tahun	12	19,4%
	11-15 tahun	13	21%
	>16 tahun	23	37,1%

Tabel 1.2 Gambaran Latar Belakang PPK di seluruh OPD Bojonegoro

Dari tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa sumber daya manusia bagian PPK di seluruh 62 OPD Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 39 orang sedangkan perempuan sebanyak 23 orang. SDM di PPK sebagian besar berusia 41-50 tahun yaitu sebanyak 34 orang dengan Pendidikan terakhir sebagian besar S1 sebanyak 39 orang serta latar belakang Pendidikan 31 orang dari ekonomi dan 31 orang dari non ekonomi. Untuk sertifikat diklat/pelatihan juga sebagian besar SDM belum memilikinya. Sebagian besar masa kerja SDM tersebut lebih dari 16 tahun yaitu sebanyak 23 orang.. Dalam hal ini terdapat beberapa kendala yang dapat kita amati yaitu sebagian besar SDM berada di usia yang kurang produktif

lagi dimana beberapa SDM tersebut sulit untuk memahami perkembangan peraturan terbaru dalam penyusunan laporan keuangan dan pada akhirnya berdampak pada kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Latar belakang Pendidikan juga berpengaruh terhadap kompetensi SDM akan tetapi SDM dari PPK tersebut sebagian berasal dari jurusan non ekonomi, hal itu mengakibatkan kurangnya pemahaman SDM dalam mengerjakan tupoksi. Sertifikat yang dimiliki SDM pun tergolong kurang, karena sebagian besar baru memiliki 1 sertifikat diklat/pelatihan bahkan ada juga yang tidak memiliki sertifikat pelatihan/diklat. Hal itu menandakan kurangnya pemerataan diadakannya pelatihan/diklat untuk SDM sebagai penunjang dalam pengeerjaan tupoksi.

Sebagai elemen dalam upaya mencapai tujuan organisasi, sumber daya manusia adalah elemen yang mempunyai peran penting dalam penerapan sistem kontrol internal dalam organisasi. Oleh karena itu, harus dijamin bahwa pengelolaan sumber daya manusia tersebut dapat dilakukan sebaik mungkin untuk membantu upaya menuju pencapaian yang dimaksudkan oleh organisasi tersebut. Yosefrinaldi (2013), dalam manajemen keuangan daerah yang baik, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung oleh latar belakang pendidikan linear dengan tugasnya, pendidikan dan pelatihan berkala, dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Jadi dalam menerapkan sistem akuntansi, SDM yang berkualitas dapat memahami logika akuntan dengan baik. Kegagalan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi

akan mempengaruhi kesalahan dalam laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Selain sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi juga mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan terutama keterandalan dan ketepatanwaktuan. Selain itu, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi maka pekerjaan tersebut akan lebih mudah dilaksanakan.

Salah satu penggunaan Teknologi Informasi di Kabupaten Bojonegoro terutama di bidang keuangan adalah dengan menggunakan aplikasi simda keuangan. Ketika aplikasi tersebut dapat membantu pemerintah daerah Bogor untuk membangun dan menggunakan sistem informasi keuangan dalam kinerja untuk pemerintahan yang baik termasuk transaksi dan informasi yang memadai. Program dalam aplikasi sistem keuangan memiliki beberapa output: 1) Akuntansi 2) Kewirausahaan 3) Akuntan dan Laporan.

Ada sejumlah hambatan yang ditemukan dalam penggunaan aplikasi simda keuangan di mana aplikasi ini tidak sepenuhnya digunakan secara optimal yang menyebabkan aplikasi keuangan simda oleh OPD di Kabupaten Bojonegoro belum mampu membantu tujuan organisasi mungkin. Hal ini disebabkan oleh kurangnya persiapan SDM pada masing-masing OPD dalam menerima dan menerapkan perangkat lunak keuangan seperti SIMDA untuk melakukan prosedur akuntansi. Selain itu, kemampuan SDM yang tidak merata juga berpengaruh karena dalam hal ini SDM tidak hanya diperlukan untuk efisien dalam akuntansi tetapi juga harus efektif dalam penggunaan komputer.

Oleh karena itu, karyawan yang bekerja dalam pengelola keuangan harus memiliki kompetensi yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Jika sebaliknya terjadi, maka penggunaan teknologi hanya akan membuat pekerjaan petugas lebih sulit. Selain itu, Sistem Kontrol Internal Pemerintah (SPIP) sebagai metode untuk dapat memantau dan memberikan kepercayaan bahwa pencapaian tujuan suatu organisasi menjadi penting, sehingga hal-hal yang direncanakan dapat dicapai.

Kewajiban dalam penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, ditetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan lokal, dan menyalurkan informasi keuangan daerah ke layanan publik.

Selain kewajiban untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, SPIP juga sangat diperlukan. Berdasarkan PP. No.60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan semua karyawan untuk memberikan kepercayaan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan dengan undang-undang. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem kontrol internal yang terorganisir secara komprehensif dalam lingkungan pemerintah baik pusat maupun daerah.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terdiri dari beberapa elemen, termasuk: (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, (5) pemantauan pengendalian internal. Seluruh proses audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya pada pemeliharaan tugas dan fungsi organisasi untuk memberikan kepercayaan yang cukup bahwa kegiatan telah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diterapkan secara efektif dan efisien dalam penciptaan sistem pemerintahan yang baik yang disebut Pengawasan Internal.

Pengawasan dalam SPIP diarahkan dengan tujuan, antara lain, untuk mendapatkan kepercayaan yang wajar dalam efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan pemeliharaan pemerintah daerah, pengarahan aparat pengawas internal pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan. (series of actions and on going basis). Selain itu, perlu juga untuk mengubah pola pikir aparat pengawasan internal pemerintah sebagai peringatan awal terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang ditunjukkan oleh KKN. (Aemando, 2013).

Mengenai unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berdasarkan PP No. 60 tahun 2008 antara lain:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian Risiko

- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi
- e. Pemantauan Pengendalian Internal

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa ditarik kesimpulan bahwa Pengendalian Internal dapat dikatakan sebagai suatu proses yang telah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintahan. Selain itu, pengendalian internal bermaksud untuk memberikan keyakinan atas pencapaiannya dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dari deskripsi diatas, topik tersebut menarik untuk dijadikan sebagai judul penelitian, dengan judul:

“Pemetaan *Problwm* Sistem Pengendalian Internal dan Dampaknya Pada Laporan Keuangan Kabupaten Bojonegoro”.

1.2 Tujuan Business Case Report MB-KM

1. Untuk mengetahui pemetaan *pemetaan problem* unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta dampaknya pada laporan keuangan.

1.3 Sistematika Business Case Report Magang MB-KM

Laporan ini terdiri dari lima sub bab, yaitu:

BAB 1. Pendahuluan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan latar belakang (argumen/alasan) dari topik yang telah dipilih dalam *business case report* ini. Penulis merumuskan masalah yang dihadapi dalam perusahaan tempat magang dan menguraikan tujuan penulisan topik *Business Case Report*. Pada sistematika *Business Cases Report* Magang MB-KM, penulis menguraikan bab dan sub bab yang terdapat dalam *Business Cases Report* Magang MB-KM.

BAB 2. Profil Organisasi dan Aktivitas Magang

Bagian ini berisi deskripsi profil spesifik organisasi yang merupakan konteks dari topik yang dipilih. Profil organisasi yang dijelaskan meliputi karakteristik organisasi yang terkait dengan topik yang dibahas, yaitu struktur organisasi, proses bisnis, ketentuan peraturan terkait, dan sebagainya. Penulis menggambarkan semua kegiatan yang dilakukan selama magang. Selain itu, penulis juga menjelaskan bagaimana mendapatkan berbagai pertanyaan yang diperoleh saat melakukan magang.

BAB 3. Identifikasi Masalah

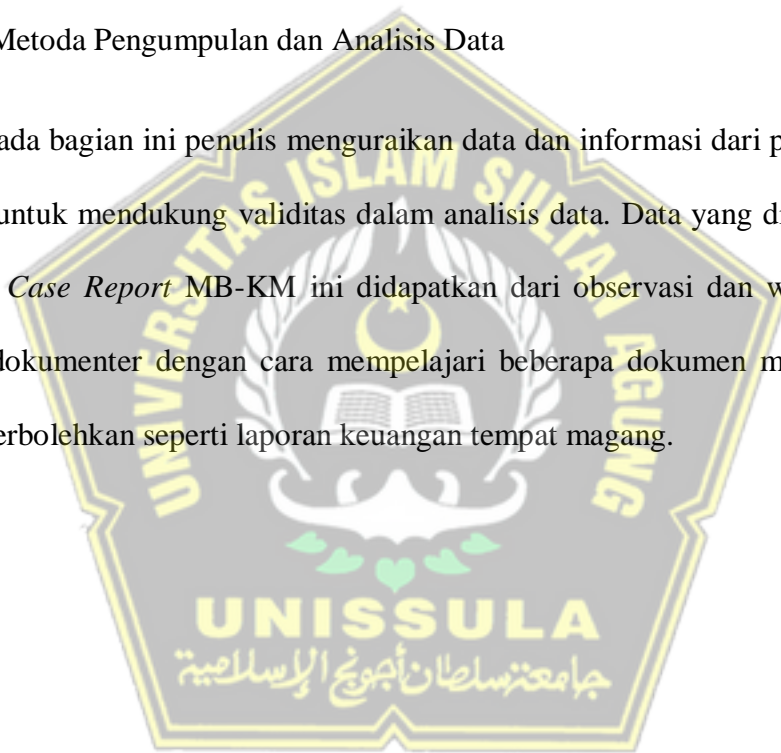
Pada bagian ini penulis mengidentifikasi masalah yang muncul di beberapa area tempat magang dan memilih beberapa masalah yang paling penting untuk dipecahkan. Penulis juga menjelaskan mengapa masalah yang dipilih itu demikian penting dan perlu dibahas dalam *Business Case Report* MB-KM ini.

BAB 4. Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis menguraikan teori yang dapat digunakan untuk membahas masalah penting yang dipilih dan yang sesuai dengan topik *Business Case Report* MB-KM. Teori yang dituliskan tidak hanya menguraikan definisi-definisi, tetapi juga berisi tentang cara-cara ideal yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah, kelebihanannya, kekurangannya dan manfaatnya.

BAB 5. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

Pada bagian ini penulis menguraikan data dan informasi dari perusahaan yang berguna untuk mendukung validitas dalam analisis data. Data yang digunakan dalam *Business Case Report* MB-KM ini didapatkan dari observasi dan wawancara serta metode dokumenter dengan cara mempelajari beberapa dokumen milik perusahaan yang diperbolehkan seperti laporan keuangan tempat magang.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

2.1.1 Gambaran Umum BPKAD Kabupaten Bojonegoro

BPKAD Bojonegoro adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang memiliki tugas untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah sesuai dengan upaya untuk menciptakan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab dan mampu menanggapi tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. BPKAD Bojonegoro adalah salah satu badan pemerintah Kabupaten Boyonegoro yang didirikan sesuai dengan Peraturan Bupati Bojonegoro No. 74 Tahun 2016, tentang penempatan, pengaturan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta peraturan kerja BPKAD Kabupaten Bojonegoro.

2.1.2 Data Instansi

Nama : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro

Alamat : Jalan P. Mastumapel No. 1 Bojonegoro

Telp/Fax : (0353) 881259/(0353) 571113

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro No 74 Tahun 2016, BPKAD memiliki tugas dan fungsi utama sebagai berikut:

- a. Persiapan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset lokal**
- b. Implementasi tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset lokal**
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan implementasi tugas dukungan teknis di bidang keuangan dan aset lokal**
- d. Pembimbingan fungsi penunjang teknis untuk mendukung urusan pemerintah setempat di bidang keuangan dan aset lokal**
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi-fungsinya.**

2.1.4 Visi dan Misi BPKAD Bojonegoro

1. Visi:

“ Terwujudnya Tata Kelola Keuangan Daerah Secara Profesional, Transparan ,Inovatif dan Akuntabel Menuju Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa “

2. Misi:

Misi merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan visi yang ditetapkan. Oleh karena itu, misi BPKAD Kabupaten Bojonegoro yaitu:

- a. **Mengimplementasikan pengawasan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan dari daerah**
- b. **Meningkatkan layanan keuangan untuk semua pihak yang membutuhkan dengan cepat, akurat, dan tepat**
- c. **Meningkatkan pelaporan akuntabilitas implementasi keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku**
- d. **Mengelola kekayaan daerah dengan hati-hati, efektif dan efisien**
- e. **Meningkatkan layanan administrasi untuk mendukung kewirausahaan keuangan daerah secara optimal**

2.1.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas:

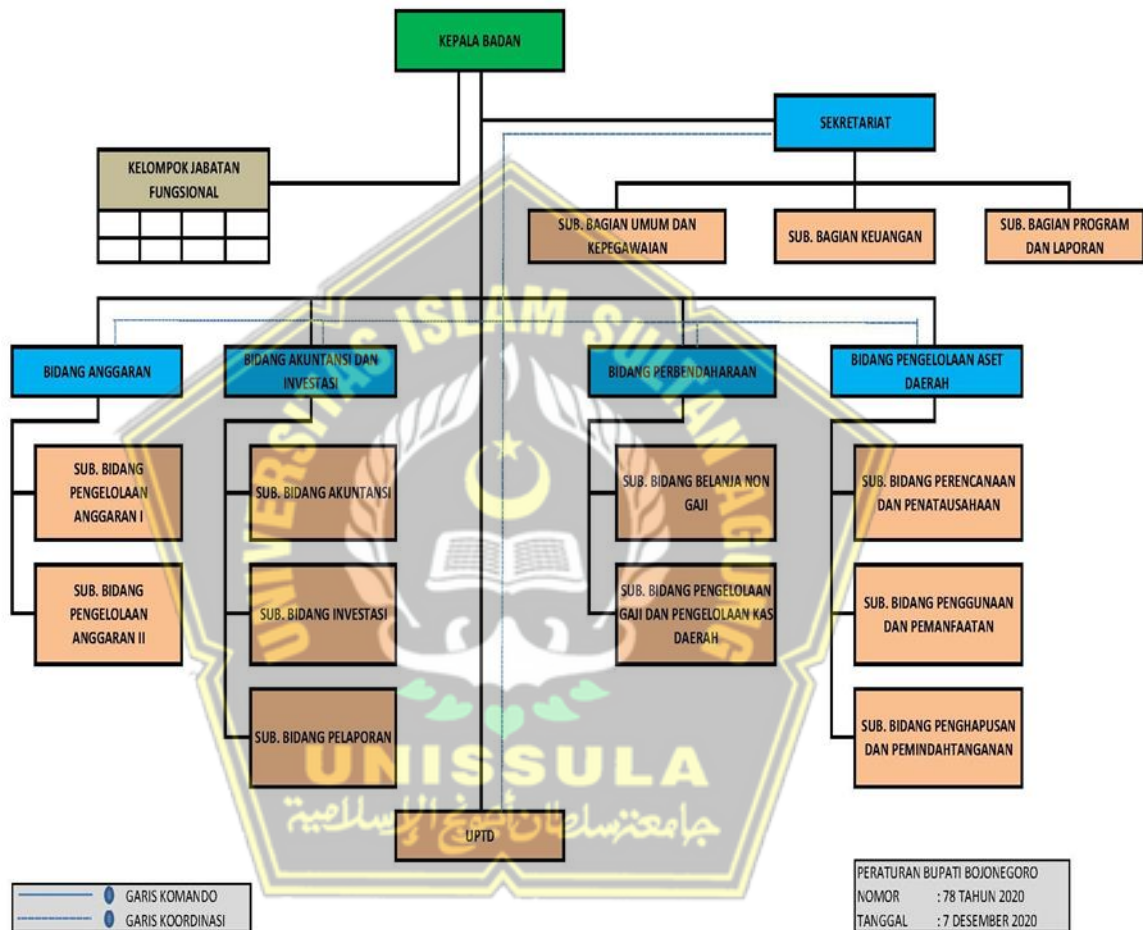
- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program dan Laporan
- c. Bidang Anggaran membawahi:
1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I
 2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II
- d. Bidang Akuntansi dan Investasi, membawahi:
1. Sub Bidang Akuntansi
 2. Sub Bidang Investasi
 3. Sub Bidang Pelaporan
- e. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
1. Sub Bidang Belanja Non Gaji
 2. Sub Bidang Pengelolaan Gaji dan Pengelolaan Kas Daerah
- f. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
1. Sub Bidang Perencanaan dan Penatausahaan
 2. Sub Bidang Penggunaan dan Pemanfaatan
 3. Sub Bidang Penghapusan dan Pemindahtanganan
- g. UPT Badan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi dan Tabel Jabatan Struktural Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro adalah sebagaimana disajikan dalam bagan sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bojonegoro

(Sumber: <https://bpkad.bojonegorokab.go.id/>)

2.2 Aktivitas Magang

a. Mencocokkan total aset tetap

Dalam hal ini yang dilakukan adalah cek laporan realisasi anggaran dan neraca di semua OPD serta kecamatan melalui aplikasi Simda Keuangan. Apabila terdapat selisih ditandai terlebih dahulu untuk nantinya akan ditelusuri lebih lanjut.

b. Menelusuri selisih yang sudah ditandai sebelumnya

Setelah mencocokkan aset tetap yang ada pada laporan realisasi anggaran dan neraca di semua OPD serta kecamatan selanjutnya yaitu menelusuri selisih yang sebelumnya sudah ditandai dengan menggunakan aplikasi Simda Keuangan lalu cek buku besar pembantu dan sub rincian laporan realisasi anggaran untuk memastikan letak selisih yang sudah ditemukan.

c. Membandingkan selisih dengan kartu kendali bukti

Setelah menemukan letak selisih yang ada pada buku besar pembantu dan sub rincian laporan realisasi anggaran selanjutnya ditelusuri dan dibandingkan dengan kartu kendali bukti di setiap OPD serta kecamatan menggunakan aplikasi Simda Keuangan.

d. Input jurnal penyesuaian

Setelah mendapatkan rincian selisih penyusutan aset tetap lalu dilanjutkan dengan tugas untuk input jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset tetap di tiap OPD dan kecamatan di Simda Keuangan.

e. Input ekuitas saldo awal

Tugas selanjutnya yaitu input ekuitas saldo awal di tiap OPD dan kecamatan tahun 2022 di Simda Keuangan.

f. Input jurnal koreksi ekuitas

Tugas selanjutnya yaitu input jurnal koreksi ekuitas di tiap OPD dan kecamatan tahun anggaran 2021 di Simda Keuangan.

g. Input jurnal penyesuaian

Tugas selanjutnya yaitu input jurnal penyesuaian atas beban penyusutan aset lain-lain tiap OPD dan kecamatan tahun 2021.

h. Cek laporan realisasi anggaran

Tugas selanjutnya yaitu cek laporan realisasi anggaran tiap OPD dan kecamatan dicocokkan file excel yang berisi rekap realisasi anggaran dari tiap OPD dan Kecamatan.

i. Input total persediaan

Tugas selanjutnya yaitu input total persediaan di tiap OPD dan kecamatan tahun 2020 dan 2021 yang diambil dari Simda Keuangan.

j. Rekap beban-beban

Selanjutnya yaitu merekap beban pegawai, beban barang, dan jasa yang diambil dari Simda Keuangan lalu dimasukkan ke dalam file excel.

k. Cek ulang laporan realisasi anggaran dan laporan operasional

Tugas selanjutnya yaitu mengecek kembali laporan realisasi anggaran yang ada di Simda Keuangan lalu dicocokkan dengan file excel yang sudah direkap. Setelah cek laporan realisasi anggaran selesai dilanjutkan dengan cek laporan operasional. dan dicocokkan dengan file excel hasil rekap sebelumnya.

l. Input data rekonsiliasi sekretariat daerah

Tugas selanjutnya yaitu input data rekonsiliasi sekretariat daerah bulan januari dan february dengan cara mencocokkan rekening koran dengan buku pembantu bank di Simda Keuangan

m. Input data rekonsiliasi kecamatan

Setelah sekretariat daerah selesai dilanjutkan dengan input data rekonsiliasi kecamatan bulan januari dan february. Setelah bulan januari dan february selesai dilanjutkan dengan input rekonsiliasi kecamatan bulan maret. Lalu dilanjutkan dengan input rekonsiliasi kecamatan bulan April.

n. Membantu acara pertemuan

Dalam seminggu diadakan pertemuan bendahara pengeluaran dari seluruh OPD dan Kecamatan untuk membahas rekonsiliasi di trimester pertama dan penulis membantu persiapan acara tersebut selama 5 hari kerja. Setelah acara selesai penulis membantu beberapa bendahara pengeluaran untuk mencocokkan antara rekening koran dan data yang ada di Simda Keuangan

untuk mencari selisih yang ada. Setelah itu penulis melanjutkan input data rekonsiliasi Kecamatan bulan Mei.



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi Masalah

Selama penulis menjalankan magang di kantor BPKAD Kabupaten Bojonegoro terdapat beberapa permasalahan yang ditemui.

1.) Sistem Pengendalian Internal

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Bojonegoro dalam reformasi anggaran dan keuangan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku sangat beragam dan kompleks. Hal ini dapat dijelaskan karena alasan lain selain peraturan yang tidak dapat dimengerti oleh pengelola keuangan yang terlibat dalam sistem pelaporan keuangan daerah. Dari persetujuan anggaran hingga persiapan laporan keuangan yang disebabkan oleh kompleksitas peraturan, kurangnya dukungan sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi yang lemah, dan kurangnya teknologi yang digunakan. Contoh masalah yang lebih spesifik adalah pengetahuan para pengelola keuangan dalam memahami isi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah masih minim, selain teknologi sistem manajemen keuangan di daerah ini tidak didukung oleh peralatan yang memadai dan perencanaan serta akurasi waktu tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sistem pelaporan keuangan di Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui PPK di seluruh OPD Kabupaten Bojonegoro untuk menyetor laporan keuangan ke BPKAD

Kabupaten Bojonegoro. Setelah pelaporan, bidang akuntansi akan memeriksa apakah laporan keuangan telah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak. Dalam pemeriksaan ini, penulis menemukan banyak kesalahan / kekurangan dalam laporan keuangan setiap OPD yang mengharuskan kami dari BPKAD untuk memperbaiki laporan keuangan masing-masing OPD. Sementara tugas bidang akuntansi khususnya bidang laporan di BPKAD Bojonegoro hanyalah mencatat seluruh laporan keuangan masing-masing OPD dan melaporkannya ke BPK. Ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh masing-masing OPD Bojonegoro belum memenuhi standar yang berlaku. Menurut penjelasan di atas, ada beberapa hal yang menyebabkan laporan keuangan tidak memenuhi standar keuangan pemerintah, yaitu:

a) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan SIMDA harus didukung oleh SDM yang dapat memahami dan dapat menggunakan program SIMDA, terutama untuk bidang teknis penganggaran, akuntansi, dan pengelola keuangan. Sistem pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada basis akrual membutuhkan dukungan dari program yang dapat memproses ribuan transaksi dengan cepat, akurat dan tepat serta didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola sistem sehingga dapat menghasilkan jangkauan target maksimum.

Kompetensi sumber daya manusia di tingkat OPD Bojonegoro belum tergolong baik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kita sering menemukan kesalahan/kekurangan dalam laporan keuangan yang dibuat dan diserahkan ke

BPKAD. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa tingkat pendidikan PPK tidak sama dan ada beberapa PPK yang sudah berada di usia yang tidak produktif sehingga mereka kurang dapat menyesuaikan laporan keuangan mereka sesuai dengan standar yang berlaku.

b. Sistem Informasi Daerah (SIMDA)

Pemerintah daerah membutuhkan sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas Pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro. Sistem tersebut juga harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu, dukungan infrastruktur aplikasi SIMDA tergolong belum maksimal karena tidak semua wilayah OPD dapat mengakses internet yang memadai, terutama OPD yang berada di wilayah kecamatan, karena ada beberapa kecamatan yang aksesnya jauh dari kota sehingga akses internet pun terkadang sulit untuk masuk ke daerah tersebut. Sedangkan untuk pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA harus didukung oleh adanya akses internet yang memadai.

Beberapa permasalahan yang penulis temui dalam pemanfaatan teknologi informasi yaitu kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan tugas diantaranya

keterbatasan perangkat komputer dan kurang update database yang telah disediakan. Adapun perangkat komputer yang sudah disediakan namun terkadang tidak dapat menunjang database yang begitu banyak sehingga performa komputer tersebut kurang maksimal. Selain itu, jaringan wifi yang disediakan juga kurang stabil. Padahal aplikasi simda keuangan membutuhkan koneksi yang stabil dan apabila koneksi terputus harus kembali log in dari awal lagi. Hal tersebut tentu membuat pekerjaan menjadi kurang efisien karena beberapa waktu terbuang karena sering kembali log in dari awal kembali



BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Teori Stewardship

Teori yang mendasari penelitian ini adalah bagian dari teori agen, teori *stewardship*. Donaldson and Davis, (1991) dalam Anton, (2010) *Stewardship* menggambarkan jika tidak ada situasi di mana manajer termotivasi untuk tujuan individual daripada lebih fokus pada tujuan utama dari kepentingan organisasi.

Teori *stewardship* didasarkan pada asumsi filosofis tentang sifat manusia bahwa pada kenyataannya manusia dapat dipercaya, dapat bertindak dengan tanggung jawab penuh, memiliki integritas dan kejujuran di sisi lain. Sukses dalam organisasi pemerintah dapat dicapai dengan memaksimalkan utilitas dari pemimpin dan manajemen. Teori *stewardship* dapat diterapkan untuk penelitian akuntansi organisasi sektor publik seperti pemerintah dan organisasi keuntungan lainnya. (Haliah, 2012 dalam Wahida 2015).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah salah satu upaya dalam mencapai pemerintahan yang baik. Pemerintah daerah harus mengungkapkan data akuntansi terkait dan informasi terkait lainnya dengan jelas dan terperinci. LKPD yang dibuat akan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

4.2 Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 terkait Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan adalah laporan keuangan terstruktur dari laporan posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan Keuangan Pemerintah dapat disebut berkualitas jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Laporan keuangan dapat dikatakan relevan ketika informasi yang terkandung di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu dan saat ini, memprediksi masa depan, dan memperbaiki hasil evaluasi masa lalu mereka. Relevansi harus memiliki elemen berikut:

a. Manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk mengkonfirmasi atau memperbaiki harapan di masa lalu

b. Memiliki manfaat prediksi. (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna memprediksi masa depan berdasarkan hasil peristiwa masa lalu dan saat ini.

c. Tepat waktu

Informasi dibuat tepat waktu agar dapat berpengaruh dan berguna saat pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi keuangan pemerintah harus disajikan sebaik mungkin, termasuk semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari kesalahan yang menyesatkan dan material, menyajikan semua fakta dengan jujur, dan dapat diperiksa. Informasi dapat dianggap dapat diandalkan jika memenuhi karakteristik berikut:

a. Penyajian jujur

Informasi yang secara jujur menggambarkan transaksi dan peristiwa lain yang harus disajikan secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat diverifikasi. (*verifiability*)

Informasi yang disajikan harus dapat diuji, dan jika diuji lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya masih menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda.

c. Neutralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak tergantung pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat dibandingkan

Informasi laporan keuangan akan lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain secara umum. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan internal dapat dilakukan ketika suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan ketika entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dimengerti oleh pengguna dan diungkapkan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna.

4.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu dari suatu organisasi (institusi) atau sistem untuk melaksanakan fungsi atau otoritasnya terhadap tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien. Hutapea (2008:28) di Saleba (2014) ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi: 1) Pengetahuan, informasi seorang karyawan harus melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang

kerja, seperti bahasa komputer. 2) Kemampuan, adalah sesuatu yang dimiliki seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang ditugaskan kepada karyawan.

Dalam pembuatan laporan keuangan yang baik, kompetensi Sumber Daya Manusia sangat penting karena jika kompetensi penyusun laporan keuangan baik maka probabilitas kinerja yang dihasilkan juga akan baik. Jika kompetensi sumber daya manusia lembaga yang mengeluarkan laporan keuangan rendah atau kurang baik, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang atau kurang berkualitas. Oleh karena itu, kompetensi sumber daya manusia yang baik akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Untuk mendukung pencapaian kualitas sumber daya manusia yang kompeten, organisasi atau lembaga dapat memberikan pelatihan kepada karyawannya dengan tujuan mencapai efektivitas kinerja dan tujuan organisasi. Manfaat dan pentingnya pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya untuk karyawan yang mengikuti pelatihan saja, tetapi dapat dirasakan oleh organisasi melalui peningkatan kinerja dan kemudian meningkatkan kinerja organisasi. (Notoatmodjo, 2009). Kompetensi sumber daya manusia mendukung organisasi dalam pekerjaan, bakat, kreativitas dan motivasi. Tidak peduli seberapa sempurna aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.

Menurut penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah salah satu hal yang penting. Sumber daya manusia akan memainkan peran aktif

dalam proses pelaporan keuangan dari awal sampai akhir. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia juga akan secara langsung terkait dengan kesesuaian laporan keuangan yang disajikan sehubungan dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi informasi yang disajikan sangat tergantung pada sumber daya manusia dalam kasus ini.

4.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memproses data, termasuk pemrosesan, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara untuk menghasilkan informasi berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, digunakan untuk tujuan pribadi, bisnis, dan pemerintah dan merupakan informasi strategis untuk pengambilan keputusan. Menurut penelitian Yosefrenaldi, penggunaan teknologi informasi dapat diukur dengan beberapa hal berikut, di antaranya adalah (1) memiliki komputer dengan jumlah yang cukup untuk melakukan tugas, (2) jaringan internet yang tersedia di unit kerja, (3) jaringan komputer telah digunakan dengan baik, (4) proses akuntansi telah dikomputerisasi, (5) perangkat lunak telah mematuhi peraturan hukum, (6) laporan akuntan diproduksi dari sistem informasi terintegrasi, (7) perawatan rutin peralatan, (8) serta peralatan yang usang atau rusak diperbaiki dan diperbaiki tepat waktu.

Penggunaan kemajuan teknologi tidak hanya dalam teknologi komputer. Jaringan Internet juga dapat digunakan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta layanan kepada masyarakat umum, salah satunya dengan kemudahan mengakses profil pemerintah daerah melalui situs resmi pemerintah daerah yang relevan. Dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa situs ini merupakan cara untuk menampilkan profil pemerintah daerah di internet dengan tujuan menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan layanan kepada masyarakat, dan menerima input dari masyarakat. Selain mengakses profil pemerintah daerah terkait, di situs resmi publik dapat mengakses informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini juga diatur dalam PP No. 56 tahun 2005 bahwa presentasi informasi anggaran, pelaksanaan, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh sistem informasi pengelola keuangan daerah diinformasikan melalui situs resmi pemerintah setempat. Ini bertujuan untuk menyampaikan pengumuman atau pemberitahuan, memberikan layanan kepada masyarakat, dan menerima input dari masyarakat.

Penggunaan teknologi informasi berarti menggunakan teknologi dalam pengolahan data untuk memfasilitasi pekerjaan karyawan. Menurut Hamzah (2009), penggunaan teknologi informasi mencakup keberadaan pemrosesan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta penggunaan kemajuan dalam teknologi informasi sehingga layanan publik dapat diakses dengan

mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh negeri. (Winidyaningrum & Rahmawati, 2010).

Penggunaan teknologi informasi meliputi pengolahan data, pemrosesan informasi, serta proses kerja elektronik untuk memberikan layanan kepada publik dengan mudah dan murah hati untuk mengakses informasi keuangan. Selain itu, pemrosesan data dengan bantuan komputer jelas akan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan.

Dalam penggunaan komputer ada banyak kemudahan yang diperoleh, seperti output pengolahan data lebih bersih jika dilakukan secara otomatis. Selain itu, pengolahan data dan ekonomi transaksi akan lebih cepat, dapat memperpendek waktu. Sementara kelemahan dalam penggunaan sistem komputer cenderung kurang fleksibel dan tidak dapat beradaptasi dengan cepat ketika ada perubahan sistem, perencanaan dan konstruksi sistem komputer membutuhkan waktu lebih lama, biaya instalasi tinggi, membutuhkan kontrol yang baik, ketika ada bagian perangkat keras yang tidak berfungsi dapat menonaktifkan sistem, komputer tidak dapat mendeteksi penyebab kesalahan, hilangnya jejak audit, komputer sensitif terhadap pengaruh lingkungan, data yang disimpan mudah rusak.

4.5 Sistem Pengendalian Internal

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Kontrol Internal Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP adalah proses

integral atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh para pemimpin dan semua karyawan, dengan tujuan memberikan kepercayaan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, keamanan aset negara dan kepatuhan dengan peraturan. Sistem kontrol internal dapat diukur dengan beberapa elemen berikut, termasuk elemen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Pengendalian internal diterapkan untuk melakukan pengawasan dan kontrol terutama dalam persiapan LKPD untuk mematuhi standar yang berlaku untuk LKDP yang memenuhi syarat. Semakin baik sistem kontrol internal suatu entitas/organisasi, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Awal dalam pengembangan, akuntansi organisasi sektor publik berfungsi untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *stewards* dan *principals*. Akuntansi adalah alat pendorong akuntansi dan diikuti oleh perubahan yang lebih kompleks, kehadiran konsentrasi dalam akuntabilitas serta pengembangan dalam organisasi sektor publik, karena pemimpin sulit melakukannya sendiri fungsi manajemen. Pada prinsipnya, akuntansi adalah alat kontrol diri, sebagai sarana untuk melaporkan kegiatan manajer pada manajemen sumber daya manusia dan keuangan.

Dalam penelitian ini, implikasi teori *stewardship* untuk penelitian ini adalah bahwa dapat menjelaskan keberadaan pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat

diandalkan dan dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakat serta dapat bertanggung jawab atas keuangan yang dipercayakan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi akan terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai maksimal. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, manajer (manajer dan auditor internal) menggunakan semua keterampilan dan keahlian yang mereka butuhkan untuk membuat kontrol internal efektif untuk menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas. (Wahida, 2015).

4.6 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keseimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengakhiri keberadaan dukungan untuk sistem informasi keuangan daerah untuk mendukung pembuatan kebijakan fiskal nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi desentralisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Lokal, yang menggantikan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang informasi keuangan regional. Salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi komputerisasi adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. SIMDA dirancang oleh BPKP yang merupakan sistem informasi yang dibangun, dikembangkan dan digunakan untuk melakukan proses persiapan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan kinerja.

BPKP sesuai dengan fungsinya sebagai auditor internal dan sebagai pelaksana kepercayaan dari pelaksana Sistem Kontrol Internal (SPIP) sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008 telah menetapkan Program Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menyediakan *database* tentang kondisi daerah yang terintegrasi dari kedua aspek keuangan, aset daerah, pegawai/ aparatur, serta layanan publik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja lembaga pemerintah daerah.
- b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, akurat dan tepat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk membuat keputusan.
- c. Mempersiapkan aparat daerah untuk penguasaan dan penyebaran teknologi informasi yang lebih baik.
- d. Memperkuat basis pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi melaksanakan otonomi daerah.

BAB V

METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

5.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini yaitu jenis data primer berupa hasil wawancara kepada Kabid Akuntansi BPKAD Bojonegoro. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa tabel opini BPK, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen lain. Berikut penjelasannya:

1) Data Primer

Untuk memperoleh data dan informasi yang valid dan akurat dilakukan wawancara kepada narasumber yang dijadikan sumber informasi yaitu Kabid Akuntansi BPKAD Kabupaten Bojonegoro mengenai permasalahan Kompetensi SDM, Pemanfaatan TI, dan SPI pada PPK di OPD Kabupaten Bojonegoro.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari beberapa sumber seperti website BPKAD, dimana penulis dapat mengambil data berupa laporan keuangan, tabel opini BPK, dan beberapa dokumen penunjang lainnya.

5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Kabid Akuntansi BPKAD Bojonegoro, Berikut penjelasan dari dua teknik pengumpulan data tersebut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (interview) tetapi juga dapat digunakan untuk merekam fenomena yang terjadi. Ada dua jenis pengamatan, langsung dan tidak langsung.

Fokus peneliti adalah observasi tidak langsung melalui kuesioner karena ada 62 OPD yang tersebar di seluruh Kabupaten Bojonegoro dan tidak memungkinkan ketika peneliti mendatangi satu per satu. Teknik pengamatan digunakan untuk menggali peristiwa bentuk data yang terjadi dengan penglihatan dan pendengaran.

2. Metode wawancara

Metode wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses interaksi antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara langsung

kepada Kabid Akuntansi BPKAD Bojonegoro mengenai kegiatan yang berhubungan dengan masalah laporan keuangan, SDM, TI, dan SPI yang ada di OPD Bojonegoro untuk mendapatkan data yang objektif.

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara mengumpulkan data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh BPKAD Kabupaten Bojonegoro seperti tabel opini BPK, laporan keuangan dan dokumen lainnya.

5.4 Analisis Data

Analisis data adalah bagian yang paling penting dari metode ilmiah, karena analisis data dapat memberi makna pada data dan membantu memecahkan masalah. Analisis data dalam penelitian deskriptif kualitatif lebih fokus selama proses penelitian lapangan. Tahap-tahap pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

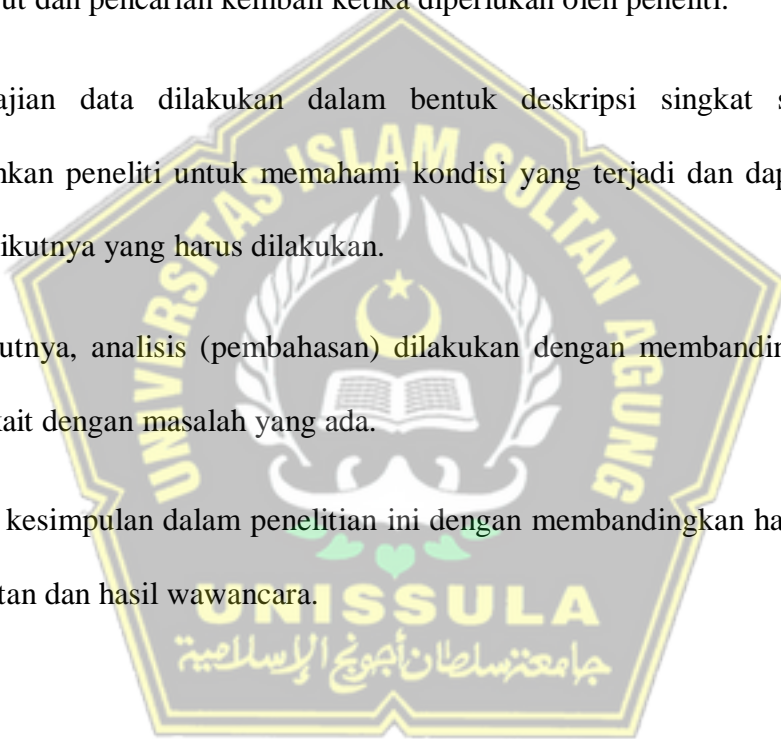
1. Pengumpulan data, di mana peneliti mencatat data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan dan dokumentasi di lapangan. Pada tahap awal ini, data yang dikumpulkan adalah dokumen yang berkaitan dengan laporan keuangan, SDM, IT, dan SPI. Dokumen yang dimaksud adalah laporan keuangan, pendapat BPK, data latar belakang SDM dan dokumen pendukung lainnya.

2. Mengurangi data, peneliti meringkas dan memilih informasi inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Seleksi dan agregasi data dilakukan jika data yang diperoleh dari sumber terlalu banyak dan tidak semuanya relevan dengan masalah yang dihadapi. Pengurangan data dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang lebih akurat dan akurat, membuatnya lebih mudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan pencarian kembali ketika diperlukan oleh peneliti.

3. Penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap berikutnya yang harus dilakukan.

4. Selanjutnya, analisis (pembahasan) dilakukan dengan membandingkan dokumen yang terkait dengan masalah yang ada.

5. Ambil kesimpulan dalam penelitian ini dengan membandingkan hasil dokumenter, pengamatan dan hasil wawancara.



BAB VI

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

6.1 Analisis data dan Pembahasan

6.1.1 Penerapan unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah di Kabupaten Bojonegoro

➤ Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah dasar dari sistem pengendalian yang terbentuk oleh perilaku orang-orang dalam organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Lingkungan pengendalian memiliki peran penting dalam meningkatkan empati dan partisipasi semua karyawan dan merupakan komitmen bersama dalam implementasinya untuk mendukung pemeliharaan elemen SPIP lainnya. Temuan yang diperoleh penulis berdasarkan wawancara dengan kabid akuntansi BPKAD Bojonegoro adalah bahwa, di lingkungan OPD distrik Bojonegoro, kepemimpinannya cukup baik, di mana pemimpin selalu memberikan instruksi yang jelas, motivasi, dan contoh langsung dalam hal pengendalian kepada karyawan. Dengan instruksi yang diberikan akan membuat lebih mudah bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka dan akan lebih kompak. Selain itu, pemimpin juga memperhatikan masing-masing karyawannya, mulai dari mengevaluasi kinerja stafnya setiap trimester dan berinteraksi dengan semua bawahannya. Namun, ada beberapa kelemahan yang ditemukan, antara lain, dalam diklat keuangan tidak diselenggarakan secara berkala

dan pengembangan SDM tidak diimplementasikan secara periodik. Hal ini menyebabkan kurangnya kompetensi SDM dan berpotensi menyebabkan beberapa dampak yang akan timbul untuk laporan keuangan seperti catatan yang salah atau identifikasi transaksi.

➤ Penilaian risiko

Kepala OPD mengidentifikasi, menganalisis risiko dan menentukan tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi risiko yang dapat menghalangi misi dan tujuan dari Kabupaten Bojonegoro. Hal ini telah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 yang berisi tentang Sistem Kontrol Internal Pemerintah (SPIP), sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian risiko di Kabupaten Bojonegoro umumnya berjalan dengan baik. Namun, dengan penilaian risiko yang dilakukan, masih ada risiko yang harus dihadapi, yaitu kurangnya pemahaman tentang SOP terbaru sehingga ada beberapa data yang tidak disinkronkan pada saat persiapan laporan keuangan.

➤ Kegiatan pengendalian

Berdasarkan unsur-unsur pengendalian internal PP No. 60 Tahun 2008 kegiatan pengendalian berupa prosedur atau kebijakan yang diterapkan untuk membantu memastikan pelaksanaan instruksi dari kepala instansi untuk mengurangi risiko yang pernah teridentifikasi selama proses penilaian risiko. Kegiatan pengendalian yang telah dilakukan oleh OPD Kabupaten Bojonegoro adalah untuk mengevaluasi kinerja karyawannya, meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan pembimbingan

untuk diklat dan pelatihan. Namun, ada kelemahan bahwa evaluasi pemisahan fungsional belum dilakukan secara berkala dan didokumentasikan. Hal ini ditandai dengan kehadiran tanda-tanda pekerjaan ganda di bagian penerimaan dan pengeluaran sehingga dapat menyebabkan kecurangan pada saat membuat laporan keuangan.

➤ Informasi dan komunikasi.

OPD Kabupaten Bojonegoro telah menerapkan elemen informasi dan komunikasi yang tepat untuk mendukung SPIP dan manajemen yang sehat. Media komunikasi yang digunakan bervariasi, baik pedoman, instruksi teknis, surat edaran, papan pengumuman, situs web dan email, atau berkomunikasi melalui grup WhatsApp yang telah dibuat dan berkomunikasi secara lisan. (tatap muka). OPD di Kabupaten Bojonegoro juga memiliki situs web yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas layanan OPD. Ini memiliki efek positif bahwa proses persiapan laporan keuangan telah dilakukan secara otomatis melalui Sistem Laporan Keuangan yang mengintegrasikan data keuangan dan aset untuk tujuan konsolidasi.

➤ Pemantauan

Monitoring harus mampu mengevaluasi kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi dari hasil audit dan revidi lainnya dapat segera diikuti. Monitoring pada OPD Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan baik, dengan adanya model monitoring yang merupakan evaluasi produksi dan implementasi

kebijakan, keberadaan sosialisasi SOP serta evaluasi SOP. Evaluasi kegiatan diatur melalui penilaian oleh otoritas pengawas internal (instansi) atau pihak eksternal BPK. Setelah evaluasi dilakukan, akan ada perbaikan dalam persiapan laporan keuangan yang sebelumnya masih memiliki beberapa kekurangan sehingga akan mendapatkan pendapat WTP.

Jika lima faktor di atas dilakukan dengan baik oleh masing-masing lembaga pemerintah, maka tujuan pemerintah akan dicapai maksimal. Oleh karena itu, dengan menerapkan secara efektif unsur-unsur di atas, OPD Kabupaten Bojonegoro juga dapat mencapai tujuan-tujuannya secara efektif dan efisien, keandalan, pelaporan keuangan, keamanan aset negara dan kepatuhan dengan undang-undang.

6.1.2 Dampak Pengendalian Internal pada OPD Kabupaten Bojonegoro

Dampak yang diperoleh dari pengendalian internal OPD pada Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Keandalan laporan keuangan

OPD Kabupaten Bojonegoro dalam penyusunan Laporan Keuangan dipandu oleh prinsip akuntansi yang pada akhir periode melakukan penilaian kinerja. Namun, karena latar belakang SDM beberapa dari non-ekonomi masih menemukan beberapa kekurangan dalam laporan keuangan sehingga mendapatkan beberapa koreksi dari BPK. Namun, secara umum, laporan keuangan Bojonegoro telah mendapatkan pendapat WTP selama lima tahun terakhir.

2. Pengamanan Aset

OPD Kabupaten Bojonegoro telah berusaha untuk mengamankan aset negara dengan berjalan dengan teratur, bertanggung jawab, dan dengan nilai yang wajar. Tindakan kontrol juga memiliki peran dari Bidang Manajemen Aset BPKAD Bojonegoro.

3. Keefektifan dan efisiensi fasilitas pemerintah

Manajemen sumber daya cukup optimal di OPD Kabupaten Bojonegoro karena sudah menerapkan SPIP sesuai PP No. 60 tahun 2008, sehingga dalam mencapai tujuan pemeliharaan pemerintah setempat yang dilakukan OPD dapat dikatakan efektif.

2. Mematuhi aturan hukum

OPD Kabupaten Bojonegoro telah berusaha mematuhi peraturan hukum yang berlaku sehubungan dengan peraturan tentang kegiatan pengawasan yang telah ditetapkan. Pemimpin juga telah memberikan instruksi dan contoh yang baik tentang etika dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang setiap karyawan.

6.3 Kelemahan dalam implementasi sistem kontrol internal pemerintah

BPK sesuai dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU No.15 Tahun 2006 tentang BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang terdiri dari Neraca pada tanggal 31 Desember, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, laporan operasional, laporan arus kas,

laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan.

Meskipun LKPD Kabupaten Bojonegoro memperoleh pendapat WTP, ada beberapa kelemahan dari SPI dan ketidakpatuhan dengan ketentuan undang-undang dalam penyusunan laporan keuangan sebagai berikut:

- a) Pembayaran penerima bantuan asuransi kesehatan nasional tidak sepenuhnya didasarkan pada data terkini, yang mengakibatkan terbuang-buang pembayaran biaya asuransian bagi peserta yang telah meninggal atau telah memindahkan penduduk.
- b) Lebih pembayaran belanja Bantuan Operasional Sekolah yang mengakibatkan pemborosan belanja dari barang belanja dan pengeluaran modal dari Boss.
- c) Data penerima bantuan sosial tambahan bantuan tunai langsung desa tidak sesuai dengan dokumentasi populasi sehingga mengakibatkan data dari proposal penerima manfaat pengeluaran bantuan sosial BLT tambahan DD tidak akurat dan valid dan distribusinya berpotensi tidak akurat target.
- d) Kekurangan volume dan kualitas atas pelaksanaan 26 paket pengeluaran modal jalan, irigasi dan jaringan pada jasa konstruksi dan penunjukan ruang publik yang mengakibatkan lebih bayar kepada eksekutif.

e) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) belum mengklarifikasi rencana berlanjut sehingga saldo KDP pada 31 Desember 2021 belum menggambarkan kondisi aktual dan potensi limbah keuangan wilayah.

Berdasarkan paparan kelemahan SPI diatas juga dapat ditarik kesimpulan untuk beberapa poin seperti kelebihan bayar, data penerima yang tidak valid, atau bukti yang tidak lengkap dapat dilihat adanya kelemahan di bagian SDM Kabupaten Bojonegoro. Ada beberapa kemungkinan yang mengakibatkan hal itu terjadi yaitu kurangnya pemahaman atas peraturan yang ada, kurangnya kompetensi yang dimiliki, dan faktor usia yang juga sudah tidak produktif sehingga kurang cekatan dalam mengikuti aturan terbaru. Berikut data tabel latar belakang SDM yang diambil sampelnya dari PPK di seluruh OPD Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi di lingkup OPD Kabupaten Bojonegoro juga masih perlu diperbaiki. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan kepada PPK di OPD Kabupaten Bojonegoro yaitu sebagai berikut:

4. Jaringan internet yang ada di kantor OPD masih belum memadai sehingga menjadi kendala saat akan penginputan laporan keuangan menggunakan simda keuangan, hal itu disebabkan karena simda keuangan membutuhkan jaringan yang stabil untuk pengoperasiannya. Apabila jaringan terputus atau lemah simda akan eror dan otomatis harus log in lagi dari awal. Hal itu tentu sangat memakan waktu untuk pengerjaan laporan keuangan

5. Server simda sering eror, dikarenakan server sering eror maka beberapa PPK harus menggunakan VPN agar tetap tersambung dengan server simda keuangan



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa, penerapan SPIP di OPD Kabupaten Bojonegoro secara umum telah dilaksanakan dengan baik, sudah menerapkan PP NO. 60 Tahun 2008. Dengan menerapkan SPIP maka pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik serta dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan juga efisien. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa SPIP pada OPD Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan cukup optimal.

Terdapat kekuarangan yang ternyata kurang memperhatikan latar belakang pendidikan pegawainya, sehingga tidak semua pegawai yang melakukan tupoksi berasal dari pendidikan ekonomi khususnya akuntansi. Dengan demikian risiko yang mungkin masih akan timbul adalah adanya salah pencatatan atau pengidentifikasian transaksi.

7.2 Rekomendasi

7.2.1 Rekomendasi Hasil Analisis Bab 6

Berdasarkan pemaparan analisis Bab 6 tersebut, rekomendasi yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut:

- a. Kepala OPD berkoordinasi dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar diadakan pelatihan/diklat secara rutin untuk SDM khususnya di PPK agar meminimalisir adanya kesalahan/ketidakfahaman dalam penerapan peraturan dalam pembuatan laporan keuangan
- b. Masih perlu diadakan proses rekonsiliasi barang setiap bulan sebagai syarat Ganti Uang (GU) dan akhir tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan OPD agar tidak terdapat data yang belum sinkron dan perlu dilakukan pemantauan berkala pada aktivitas penerimaan retribusi di lapangan agar tidak terjadi double job atau kecurangan
- c. Kepala OPD memberikan perhatian dan melakukan koordinasi untuk pengecekan jaringan internet dan server agar dapat memudahkan PPK dalam menginput data di Simda Keuangan agar lebih efektif dan efisien saat pengerjaan tugas.
- d. Kepala OPD melakukan koordinasi rutin untuk penyampaian dan mengingatkan tentang SOP kepada pegawai agar tidak terdapat salah saji atau salah pengambilan keputusan untuk pembuatan laporan keuangan
- e. Melakukan rapat koordinasi dan pengecekan final terkait keakuratan pencatatan transaksi dengan bendahara di setiap bidang sebelum tutup buku. Hal ini dilakukan agar tidak terdapat kesalahan pengklasifikasian transaksi yang melewati tanggal tutup buku dan pengulangan kesalahan yang sama

- f. Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan validasi atas seluruh data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dan Pekerja Penerima Upah Pegawai Non Pegawai Negeri (PPU PPNPN)
- g. Kepala Dinas Pendidikan untuk menginstruksikan para Kepala Sekolah agar tertib dalam pengelolaan Dana BOS dan meng-SPJ kan belanja sesuai bukti yang sebenarnya.
- h. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil terkait verifikasi dan validasi data penerima Bantuan Sosial Tambahan BLT DD dari desa
- i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang untuk memposes kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Daerah, serta menerbitkan surat keterangan lunas atau penyelesaian kerugian daerah kepada pihak terkait yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian daerah
- j. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar berkoordinasi dengan Kepala OPD terkait untuk melakukan inventarisasi dan penetapan kelanjutan KDP
- k. Pihak terkait seharusnya bisa menempatkan SDM yang memang memiliki latar belakang ekonomi di bagian PPK karena di PPK masih ada sebagian SDM yang memiliki latar belakang non ekonomi

7.2.2 Rekomendasi Organisasi Tempat Magang

Selama pelaksanaan magang, penulis banyak mendapatkan pelajaran yang diterima. Kinerja dari Bidang Akuntansi sangatlah baik. Para pegawai yang ada di Sub Bidang tersebut sangat kompak dalam melakukan tugas-tugasnya. Saran yang diberikan untuk Bidang Akuntansi yaitu lebih mengutamakan pengarsipan terhadap dokume-dokumen yang dianggap penting dan masih dpaat digunakan dimasa yang akan datang. Pengarsipan yang baik akan sangat membantu dalam pengerjaan tugas.

7.2.3 Rekomenadasi Program Studi

Kegiatan magang MBKM ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa dalam mengembangkan softskill maupun hardskill, tetapi menurut penulis ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh program studi yaitu: program studi dapat menyiapkan timeline untuk magang agar tidak terjadi simpang siur dalam pendaftaran maupun pelaksanaan magang. Selain itu program studi bisa menyiapkan buku pedoman sebelum pelaksanaan magang dimulai agar mahasiswa tahu apa saja yang akan dikerjakan atau lakukan saat di tempat magang. Penulis juga berharap agar kedepannya, program magang yang sekarang ini dapat berkembang lagi ke tahap selanjutnya dengan mendatangkan kerjasama yang lebih luas cakupannya antara Universitas/Fakultas dengan perusahaan/instansi, sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mahasiswa agar dapat mengikuti magang.



BAB VIII

REFLEKSI DIRI

Dengan dilakukannya kegiatan magang yang merupakan salah satu bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka akan semakin menambah wawasan serta ilmu pengetahuan yang lebih luas mengenai dunia kerja. Program magang ini juga dapat mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki oleh mahasiswa sebelumnya. Selama mengikuti program magang, penulis mendapatkan beberapa nilai yang sebelumnya kurang dimengerti, berikut ini ada beberapa nilai yang dirasakan oleh penulis selama menjalankan aktivitas magang, sebagai berikut ini:

a. Disiplin

Pada saat melaksanakan magang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro, penulis diajarkan dan diarahkan untuk disiplin secara waktu, pakaian maupun pekerjaan. Contohnya yaitu pada saat hari pertama magang, penulis diarahkan untuk datang sebelum pukul 08.00 WIB. Selain itu penulis juga diberi arahan mengenai ketentuan seragam yang harus diikuti yaitu setiap hari Senin-Kamis memakai pakaian atasan putih dan bawahan hitam serta di hari Jum'at menggunakan pakaian batik dan bawahan hitam. Dari sinilah penulis belajar untuk disiplin waktu.

b. Ketelitian

Penulis juga diajarkan untuk teliti pada saat melakukan pekerjaan, agar mengurangi resiko tidak balance atau selisih akibat salah penginputan data. Contohnya yaitu pada saat penginputan jurnal di SIMDA Keuangan harus lebih teliti agar tidak salah input akun ataupun nominal agar mengurangi resiko tidak balance atau selisih.

c. Kerjasama Tim

Adanya kerjasama tim yang terbentuk sangat mendukung keberhasilan pekerjaan yang sedang dikerjakan selama kativitas magang berlangsung. Kerjasama tim bisa dibuat dalam bentuk apapun seperti membagi tugas atau pekerjaan yang diberikan agar cepat selesai.

Penulis menyadari kekurangan yang dimiliki selama ini, maka dari itu dengan adanya program magang ini diharapkan dapat membantu mengembangkan diri menjadi lebih baik agar kelak setelah lulus sudah siap untuk memasuki dunia kerja. Pengembangan diri menjadi ke arah yang lebih baik, juga didukung oleh lingkungan kerja yang positif dan nyaman.

Dalam sebuah kesuksesan untuk tercapainya tujuan dari program magang, diperlukan semangat serta tekad agar menjadi pribadi yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Setelah mengikuti program magang ini, penulis mengharapkan agar menjadi pribadi yang siap untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan skill serta ilmu pengetahuan yang sudah didapat dari perkuliahan maupun program magang ini.

Penulis berharap agar kedepannya program magang ini akan terus berlanjut agar dapat melatih diri dan mengembangkan ilmu pengetahuan mahasiswa di Indonesia, khususnya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis juga berharap agar kedepannya, program magang yang sekarang ini dapat berkembang lagi ke tahap selanjutnya dengan mendatangkan kerjasama yang lebih luas cakupannya antara Universitas/Fakultas dengan perusahaan/instansi, sehingga dapat memberikan kesempatan yang lebih besar untuk mahasiswa agar dapat mengikuti magang.



DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, I., & Afidatul Khotijah, S. (2020). ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (STUDI KASUS PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SEMARANG). *Jurnal KRISNA*, 95-102.
- Fikri, Z., & Mardani, R. M. (n.d.). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*. Retrieved 9 19, 2021, from <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/421>.
- Indrayani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat . *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 1-16.
- Mali, M. G. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Laporan Keuangan Pemerintah . *Jurnal Populika*, 34-49.
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874-890.
- Mufidah, A., Susyanti, J., & Slamet, A. R. (n.d.). *Jurnal Ilmiah Riset Manajemen*. Retrieved 9 19, 2021, from <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/133>
- Pulungan, M. (2013301-316). OPTIMALISASI SIMDA DALAM MEWUJUDKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KAB. KUTAI KARTANEGARA YANG LEBIH BERKUALITAS. *Jurnal Bina Praja*.
- Sundari, H., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap

Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2018). *e-Proceeding of Management* , 6(1), 660-667.

Tadeko, N. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. *105 e journal katalogis*, 104-115.

Usman, R. (n.d.). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*. Retrieved 9 19, 2021, from <https://journals.telkomuniversity.ac.id/jaf/article/view/902>

